

Tragedi Penculikan Aktivis 1998 Dalam Lensa Pendidikan Demokrasi dan Ham

Nova Lailatul Aini¹, Irawan Hadi Wiranata²

Universitas Nusantara PGRI Kediri¹²

novalailatul9@gmail.com¹, wiranata@unpkdr.ac.id²

ABSTRACT

The 1998 activist abduction tragedy is a crucial event in Indonesia's political history that highlighted human rights violations and the failure of democracy during the New Order era. It occurred in the context of the economic and political crisis that hit Indonesia on the eve of reformasi. The abduction of a number of pro-democracy activists by the state apparatus showed repressive practices that were contrary to the principles of democracy and human rights. This study aims to analyze the event from the perspective of democracy and human rights education, focusing on its impact on increasing political awareness and democratic culture in Indonesia. The research method used is a qualitative approach. Thus, the lack of attention to this tragedy in education is an important reason for this research, so that the current generation can understand the importance of preserving and protecting human rights and democratic principles. This tragedy provides valuable lessons about the importance of democracy and human rights education, in order to raise the next generation's awareness of human rights violations and injustice. This research concludes that the 1998 activist abduction tragedy should be an important material in democracy and human rights education to prevent similar violations in the future.

Keywords: Democratic Education, 1998 Reform, Human Rights

ABSTRAK

Tragedi penculikan aktivis 1998 merupakan peristiwa krusial dalam sejarah politik Indonesia yang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta kegagalan demokrasi pada masa Orde Baru. Peristiwa ini terjadi dalam konteks krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia menjelang reformasi. Penculikan sejumlah aktivis pro-demokrasi oleh aparat negara menunjukkan praktik represif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peristiwa tersebut dari perspektif pendidikan demokrasi dan HAM, dengan fokus pada dampaknya terhadap peningkatan kesadaran politik dan budaya demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan demikian kurangnya perhatian terhadap tragedi ini dalam pendidikan menjadi alasan penting penelitian ini dilakukan, sehingga generasi sekarang dapat memahami pentingnya menjaga dan melindungi hak asasi manusia serta prinsip demokrasi. Tragedi ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya pendidikan demokrasi dan HAM, guna meningkatkan kesadaran generasi berikutnya terhadap pelanggaran hak asasi dan ketidakadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tragedi penculikan aktivis 1998 seharusnya menjadi materi penting dalam pendidikan demokrasi dan HAM untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Kata Kunci: Pendidikan Demokrasi, Reformasi 1998, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Tragedi penculikan aktivis 1998 yaitu salah satu peristiwa penting dalam sejarah transisi politik Indonesia menjelang berakhirnya rezim Orde Baru. Hamid, et al. (2005) memaparkan bahwa sampai sekarang pelanggaran HAM yang berat tersebut masih gelap. Menurutnya, banyak pihak yang



Link Pendaftaran: <https://s.id/senja-kkn>

mengelak dan menghindar dari tanggung jawab terhadap tragedi tersebut, yang menciptakan ketidak jelasan dalam proses penyelesaian hukum serta memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Sikap tersebut tidak hanya memperpanjang penderitaan para korban dan keluarga mereka, tetapi juga menghambat upaya rekonsiliasi sosial yang seharusnya menjadi langkah penting dalam membangun demokrasi yang lebih kuat dan menghargai hak asasi manusia serta keadilan. Hal ini juga akan menghambat proses rekonsiliasi sosial yang seharusnya menjadi bagian penting dalam memperkuat demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika ketegangan terus dibiarkan tanpa penyelesaian, hal ini dapat memperdalam *polarisasi* masyarakat, memperkuat *stereotip*, dan melemahkan solidaritas sosial. Rekonsiliasi membutuhkan pengakuan atas kesalahan masa lalu, komitmen untuk memperbaiki ketidakadilan, dan upaya membangun dialog yang inklusif. Tanpa langkah konkret menuju rekonsiliasi, potensi konflik berulang tetap tinggi, menghambat terciptanya perdamaian yang berkelanjutan serta pembangunan yang adil dan merata.

Peristiwa ini terjadi di tengah desakan masyarakat terhadap reformasi, yang mengarah pada tuntutan pembaharuan politik, sosial, dan ekonomi, namun dihadapkan dengan respon *represif* dari aparat negara. Tindakan represif tersebut tidak hanya memperburuk keadaan, akan tetapi juga semakin merusak kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Bukan hanya membuka ruang untuk dialog, pendekatan keras ini justru sering memicu gelombang protes yang lebih besar, menciptakan lingkaran kekerasan yang sulit diakhiri. Dalam situasi ini, reformasi yang diharapkan yaitu, mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan justru terhambat oleh penolakan dari kelompok-kelompok yang merasa kepentingannya terancam oleh perubahan. Sejumlah aktivis yang terlibat dalam gerakan reformasi, baik dari kalangan mahasiswa maupun organisasi masyarakat sipil, menjadi sasaran penculikan dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempertahankan kekuasaan Orde Baru. Peristiwa ini mencerminkan adanya pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM) khususnya hak untuk bebas dari ancaman, penyiksaan, dan persekusi.

Tulisan dalam opini *Tempo* 19-23 Mei 2003 dalam Edisi Khusus 5 Tahun reformasi "1998-2003" menuliskan bahwa peristiwa Mei 1998 sulit sekali ditentukan siapa yang harus menjadi tersangka. Peristiwa 1998 dikategorikan sebagai aksi massa yang spontan, yaitu aksi yang bisa dikategorikan sebagai kriminal murni. Aksi massa yang terjadi pada tragedi 1998 dipicu oleh ketidak puasan terhadap rezim Orde Baru. Dalam konteks ini, tragedi 1998 dapat dipandang sebagai *manifestasi* dari ketegangan sosial yang meledak akibat penindasan dan ketidakadilan struktural. Namun, meskipun banyak yang beranggapan bahwa peristiwa tersebut adalah akibat dari ketidak puasan rakyat terhadap pemerintahan Soeharto, identifikasi siapa yang seharusnya dipertanggungjawabkan atas kerusuhan tersebut menjadi kompleks. Peristiwa tersebut bukan hanya bisa dikategorikan sebagai



Link Pendaftaran: <https://s.id/senja-kkn>

kriminalitas murni, melainkan juga sebagai bentuk perlawanan politik yang mengandung dimensi sosial dan historis yang mendalam, yang mencerminkan kegagalan sistem dalam mengelola ketidakadilan. Faktor ekonomi, sosial, dan politik saling memengaruhi dalam menciptakan kondisi yang memicu kerusuhan tersebut. Ketimpangan ekonomi yang mencolok, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela, serta pembatasan kebebasan rakyat selama era Orde Baru menjadi akar permasalahan yang tidak dapat diabaikan. Selain itu, polarisasi sosial yang muncul, baik akibat kebijakan maupun narasi rezim, turut memperburuk keadaan. Akumulasi kekecewaan dan kemarahan masyarakat akhirnya memuncak, menyebabkan kerusuhan besar yang tidak hanya merusak infrastruktur, akan tetapi juga semakin melemahkan tatanan sosial yang sudah rapuh.

Dari perspektif pendidikan demokrasi, tragedi penculikan aktivis 1998 merupakan titik balik yang mendalam dalam upaya pembentukan dan penguatan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Dalam Koran *Tempo* edisi 14 Oktober 2010, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan bahwa demokrasi menyediakan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat. Peristiwa ini menyoroti pentingnya pemahaman mengenai HAM sebagai fondasi dari sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, tragedi 1998 menjadi tantangan bagi pendidikan demokrasi di Indonesia, yaitu bagaimana memformulasikan dan menginternalisasi nilai-nilai penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap aktivisme politik dalam proses pembelajaran.

Tragedi 1998 menjadi bagian dari pendidikan demokrasi dan HAM, karena tragedi ini menjadi bahan refleksi yang mendalam tentang pentingnya upaya preventif dan korektif dalam menjaga agar hak-hak individu tetap terlindungi, sekaligus memastikan bahwa negara dapat berfungsi secara transparan, akuntabel, dan adil. Oleh karena itu, memandang tragedi penculikan aktivis 1998 melalui lensa pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia bertujuan untuk membangun kesadaran kritis yang diperlukan mahasiswa guna mencegah terulangnya tragedi 1998 di masa depan. Sebagaimana dikemukakan Hermawan, (2004:6) menyatakan bahwa mahasiswa memiliki idealisme dan pergerakan mereka lebih bersifat gerakan moral (*moral force*). Kepedulian, kepekaan, dan perilaku mereka dalam merespon terhadap persoalan kondisi bangsa saat ini yang diwujudkan dalam gerakan sosial merupakan bentuk partisipasi politik mereka. Gerakan sosial dipandang sebagai nilai yang monumental dari tuntutan realitas masyarakat, khususnya oleh mahasiswa kearah perubahan sosial yang lebih baik dan maju.



METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, yaitu Tragedi Penculikan Aktivis 1998 Dalam Lensa Pendidikan Demokrasi dan Ham. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian Kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2013: 1).

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui kajian terhadap buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian, dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tragedi penculikan aktivis 1998 merupakan babak kelam dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju demokrasi. Tragedi penculikan aktivis 1998 juga disebut sebagai salah satu bab kelam dalam sejarah orde baru, ketika pemerintah menggunakan kekuatan militer untuk membungkam suara-suara kritis yang menuntut perubahan dan keadilan. Aktivis pro-demokrasi, yang terdiri dari mahasiswa, pegiat HAM, dan tokoh pergerakan lainnya, menjadi sasaran utama penculikan dan penghilangan paksa oleh aparat keamanan. Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK) pernah menyampaikan data bahwa tragedi Mei 1998 telah menelan korban 1.217 jiwa (Zein, 2005). Mereka diculik secara sistematis karena dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas pemerintahan Soeharto yang mulai goyah akibat krisis ekonomi dan tuntutan reformasi yang semakin besar. Menurut Stanley (2005) ketika krisis sudah terjadi tahun 1997 rakyat di sejumlah daerah yang mulai frustasi nekad melakukan penjarahan di toko-toko penyalur sembako yang banyak diantaranya milik orang Tionghoa. Para aktivis mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk penyiksaan fisik dan mental, selama dalam tahanan yang tidak diakui secara resmi.

Tindakan ini sering disebut represif yaitu tindakan yang mencerminkan pola pemerintahan otoriter orde baru, yang mengutamakan stabilitas politik dengan cara menekan kebebasan berekspresi dan meredam gerakan masyarakat. Tragedi ini tidak hanya menunjukkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, akan tetapi juga menggambarkan bagaimana negara menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaan tanpa mempedulikan konsekuensinya terhadap rakyat. Jika ada yang berani menentang atau menyampaikan kritik mereka terhadap pemerintahan maka orang tersebut akan berhadapan dengan angkatan bersenjata, ditangkap atau di penjara Baity dan Adi (2016). Pendekatan seperti ini menimbulkan rasa



takut di masyarakat dan menciptakan budaya diam, di mana kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai ancaman serius. Akibatnya, ruang untuk demokrasi semakin terbatas, dan kebebasan warga sipil berada di ujung kehancuran. Generasi yang tumbuh di bawah rezim tersebut sering dipaksa menerima ketidakadilan sebagai hal yang biasa, sementara mereka yang berani melawan menghadapi risiko hilang secara paksa, penahanan tanpa alasan jelas, atau bahkan kehilangan nyawa.

Hingga saat ini, kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998 masih menjadi catatan hitam yang belum sepenuhnya terselesaikan, dengan banyak pihak terus menuntut pengungkapan kebenaran, penegakan keadilan, dan pertanggungjawaban dari mereka yang terlibat. Tragedi ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kebebasan dan melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan demi mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Saat itu, sejumlah aktivis yang kritis terhadap rezim Orde Baru menjadi korban penculikan, penyiksaan, dan penghilangan paksa, dengan sebagian tidak pernah ditemukan hingga kini. Masyarakat belum diyakinkan mengapa tragedi berdarah itu tidak diungkapkan atau sengaja didiamkan Rahayu (2022). Pada masa ini sejumlah aktivis yang kritis terhadap rezim menjadi korban penculikan, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Banyak dari mereka yang terlibat dalam gerakan pro-demokrasi dan menentang kebijakan pemerintah menjadi sasaran utama aparat keamanan. Mereka mengalami penyiksaan fisik dan mental dengan tujuan untuk menghancurkan gerakan yang mereka dukung. Beberapa dari mereka hilang tanpa jejak, dan hingga kini keluarga serta rekan-rekan mereka masih berusaha mencari keadilan serta kejelasan mengenai nasib mereka. Peristiwa ini meninggalkan bekas yang dalam dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Peristiwa ini juga mencerminkan pelanggaran berat terhadap HAM dan penyalahgunaan kekuasaan untuk meredam perbedaan pendapat.

Dalam Lensa Pendidikan Demokrasi dan HAM, Tragedi Penculikan Aktivis 1998 dapat disebutkan dari perspektif demokrasi, perspektif ham, relevansi pendidikan demokrasi dan ham, serta tantangan penegakan demokrasi dan ham.

1. Tragedi Penculikan dalam Perspektif Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut Widiawati dan Wiranata (2022). Tragedi penculikan aktivis 1998 terjadi pada masa Orde Baru, ketika pemerintah menggunakan kekuatan militer untuk menekan suara-suara kritis. Para aktivis yang menyuarakan reformasi dan menentang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas rezim. Tulisan Kompas edisi 12 Mei 2021, setidaknya ada enam agenda reformasi, keenam agenda itu adalah adili Soeharto dan kroni-kroninya, amendemen UUD 1945 untuk memperkuat demokrasi, hapuskan dwifungsi ABRI, otonomi daerah seluas-luasnya,



tegakkan supremasi hukum, dan ciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- a. Agenda pertama yang menjadi perhatian utama reformasi yaitu mengadili Soeharto dan para kroninya atas pelanggaran yang dilakukan selama masa pemerintahannya. Selama Orde Baru, Soeharto beserta keluarganya dan orang-orang terdekatnya terlibat dalam berbagai kasus korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara dan rakyat Indonesia. Meskipun Soeharto telah turun dari kekuasaan, pertanggungjawaban atas tindakannya tetap penting untuk menegakkan keadilan dan memberi efek jera kepada para pelaku lainnya. Mengadili Soeharto dan kronikroninya adalah bentuk pengakuan atas korban-korban yang terzalimi, sekaligus memperbaiki citra hukum di Indonesia agar dapat menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum.
- b. Agenda kedua yaitu perubahan atau amendemen terhadap UUD 1945 untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Sebelum reformasi, UUD 1945 dianggap terlalu memberi kekuasaan besar pada presiden, yang pada gilirannya berpotensi menciptakan pemerintahan otoriter. Dengan amandemen, diharapkan dapat memperbaiki struktur pemerintahan Indonesia dengan menyeimbangkan kekuasaan antara lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Amandemen ini juga bertujuan untuk memastikan adanya pemilu yang lebih bebas, adil, dan demokratis, dengan memperkuat posisi parlemen sebagai lembaga yang memiliki kontrol terhadap eksekutif, serta melibatkan rakyat lebih langsung dalam proses pengambilan keputusan politik.
- c. Salah satu agenda reformasi yang paling penting yaitu penghapusan dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Pada masa Orde Baru, ABRI tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, akan tetapi juga terlibat dalam politik praktis, baik melalui jabatan di pemerintahan maupun parlemen. Hal ini menciptakan tidak seimbangnya antara militer dan masyarakat sipil, serta menghambat perkembangan demokrasi. Dengan menghapuskan dwifungsi ABRI, yang bertujuan untuk mengembalikan militer pada tugas utamanya yaitu menjaga kedaulatan dan keamanan negara, sementara urusan politik dan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan masyarakat sipil yang dipilih melalui pemilu yang demokratis.
- d. Agenda keempat yaitu memberikan otonomi daerah seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Sebelumnya, pemerintah pusat memiliki kendali yang sangat kuat terhadap daerah, yang sering kali menyebabkan ketimpangan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan memberikan otonomi yang lebih besar, daerah diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih efisien sesuai dengan kebutuhan



dan potensi lokal. Selain itu, otonomi daerah memungkinkan masyarakat setempat untuk lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Pembagian kekuasaan yang lebih seimbang ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

- e. Agenda reformasi kelima yaitu menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Selama masa Orde Baru, hukum sering kali diperlakukan tidak adil, dengan adanya perbedaan atau tidak setara dalam penegakan hukum dan tidak ada perpihakkan yang jelas antara rakyat biasa dan penguasa. Untuk memastikan bahwa negara berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, diperlukan penegakan hukum yang independen, adil, dan tanpa pandang bulu. Hal ini termasuk memperbaiki sistem peradilan, mencegah adanya campur tangan politik dalam proses hukum, serta memberikan ruang bagi lembaga-lembaga hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung untuk beroperasi secara transparan dan bebas dari korupsi. Dalam hal ini, penciptaan sistem hukum yang kuat dan dapat dipercaya akan mendorong masyarakat untuk lebih percaya kepada negara dan sistem yang ada.
- f. Agenda terakhir atau agenda yang ke enam yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selama Orde Baru, praktik KKN telah merajalela di hampir semua sektor pemerintahan, yang mengarah pada ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada masa pemerintahan Soeharto, praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merajalela di panggung politik yang hanya diisi oleh keluarga pejabat politik itu sendiri, sehingga KKN dapat dilakukan secara bebas dan berkelanjutan Baity dan Adi (2016). Oleh karena itu, reformasi di bidang KKN sangat krusial untuk memastikan bahwa pejabat publik bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang melibatkan pembentukan lembaga-lembaga untuk mengawasi dan memberantas praktik korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Dengan pemerintahan yang bersih, Indonesia dapat membangun negara yang lebih sejahtera dan adil bagi seluruh rakyatnya.

Sebagai sistem yang menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat, demokrasi bertolak belakang dengan praktik kekerasan yang dilakukan saat itu. Negara, yang seharusnya melindungi hak-hak warga negara, justru menjadi pelaku pelanggaran. Pendidikan demokrasi perlu menanamkan pemahaman bahwa kebebasan politik



adalah hak mendasar yang harus dilindungi dalam masyarakat yang adil dan terbuka. Sebagaimana dikemukakan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak fondasi demokrasi.

2. Tragedi Penculikan dalam Perspektif HAM

Tragedi penculikan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada tindakan penculikan yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti militer, polisi, atau aparat negara, terhadap individu atau kelompok tertentu. Tindakan ini jelas melanggar hak dasar manusia, terutama hak hidup, kebebasan, dan perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang. Dalam sudut pandang HAM, tragedi ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak mendasar manusia. Para korban kehilangan kebebasan, keamanan, bahkan nyawa mereka. Tindakan seperti penculikan, penyiksaan, dan penghilangan paksa jelas bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menjamin hak atas kehidupan dan keamanan setiap individu.

Dari perspektif HAM, penculikan aktivis 1998 menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi warganya dari penyalahgunaan kekuasaan. Pendidikan mengenai tragedi ini dapat memberi pemahaman kepada generasi muda bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penyiksaan, dan pelanggaran hak lainnya. Selain itu, tragedi 1998 mengajarkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak minoritas dalam sistem pemerintahan. Tragedi 1998 menjadi pelajaran penting untuk pendidikan HAM, di mana generasi muda harus memahami bahwa pelanggaran HAM tidak hanya melukai korban, akan tetapi juga mencederai prinsip-prinsip kemanusiaan secara keseluruhan. Dengan memahami peristiwa ini, mahasiswa dapat belajar pentingnya menjaga hak-hak individu sebagai bagian dari sistem yang adil dan beradab.

3. Relevansi Tragedi dalam Pendidikan Demokrasi dan HAM

Tragedi penculikan 1998 sangat relevan dalam pendidikan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) karena, peristiwa ini menggambarkan pelanggaran serius terhadap hak dasar individu dan menyoroti pentingnya sistem yang adil serta transparan dalam menjaga demokrasi. Dalam konteks pendidikan demokrasi, tragedi ini mengajarkan nilai kebebasan berpendapat, hak untuk mengkritik pemerintah, dan hak setiap individu untuk hidup tanpa rasa takut akan penindasan dari manapun termasuk aparat negara. Penculikan yang dilakukan oleh aparat negara dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan dan keadilan, serta menunjukkan bagaimana negara bisa menyalahgunakan kekuasaannya untuk menekan oposisi.



Tragedi penculikan aktivis 1998 memiliki nilai penting dalam pendidikan demokrasi dan HAM, terutama untuk membangun kesadaran kritis terhadap bahaya sistem otoriter dan pentingnya perlindungan terhadap hak sipil. Tragedi ini dapat dijadikan studi kasus dalam pembelajaran formal untuk:

- a. Mengembangkan Kesadaran Kritis: Melalui kajian sejarah, mahasiswa dapat memahami bagaimana otoritarianisme membatasi kebebasan dan dampaknya pada masyarakat. Dengan membandingkan kondisi di masa lalu dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, mahasiswa akan mampu menilai bagaimana kebijakan otoriter merugikan masyarakat, memperburuk ketidakadilan, dan merampas peluang bagi perkembangan sosial dan ekonomi.
- b. Mendorong Partisipasi Politik: Peristiwa ini mengajarkan pentingnya keberanian dalam memperjuangkan keadilan dan kebebasan politik. Dengan memahami bagaimana perjuangan individu dan kelompok untuk menuntut hak yang dapat mengubah jalannya sejarah, mahasiswa harus aktif berpartisipasi dalam proses politik. Tragedi 1998 mengingatkan bahwa, demokrasi bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja, melainkan harus diperjuangkan melalui partisipasi aktif, keberanian dalam menyuarakan ketidakadilan, serta komitmen untuk menjaga kebebasan dan hak asasi manusia.

Memahami Pentingnya Keadilan: Pendidikan HAM dapat menanamkan nilai penting dari keadilan transisional sebagai cara untuk menyelesaikan konflik masa lalu dan membangun kepercayaan di masyarakat. Keadilan transisional mengajarkan bahwa untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, penyelesaian terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu harus dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kekerasan dan pelanggaran serupa di masa depan, dengan membangun kesadaran kolektif yang menekankan pentingnya menghargai hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam masyarakat.

4. Tantangan Penegakan Demokrasi dan HAM di Indonesia

Meski demokrasi di Indonesia telah berkembang sejak era Reformasi, penyelesaian kasus penculikan aktivis 1998 masih menghadapi banyak hambatan. Kurangnya kemauan politik dan kelemahan dalam sistem hukum membuat proses penegakan keadilan berjalan lambat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia untuk memperkuat komitmen terhadap demokrasi dan HAM. Tantangan tersebut dapat berupa:

- a. Kurangnya Kemauan Politik

Salah satu hambatan utama dalam penyelesaian kasus penculikan aktivis 1998 adalah minimnya kemauan politik dari pemerintah dan pihak yang berwenang. Meskipun demokrasi di Indonesia telah



berkembang sejak era Reformasi, banyak pihak yang terlibat termasuk pemerintah dan partai politik, enggan untuk membuka kasus-kasus masa lalu seperti penculikan aktivis 1998. Ketakutan akan dampak politik yang bisa muncul apabila kasus ini dibuka kembali menjadi alasan bagi sebagian pihak untuk tidak mendukung penyelidikan dan penyelesaian secara transparan. Beberapa pihak yang memiliki pengaruh dalam politik mungkin merasa terancam jika kasus ini dilanjutkan, sehingga kepentingan politik sering kali menghalangi upaya penegakan hukum.

b. Kelemahan dalam Sistem Hukum

Indonesia juga menghadapi masalah besar dalam sistem hukumnya, yang menghambat penyelesaian kasus penculikan aktivis 1998. Kelemahan dalam sistem ini meliputi kurangnya infrastruktur hukum yang memadai, ketidakmampuan pengadilan untuk menangani kasus pelanggaran HAM dengan efisien, serta proses hukum yang lambat. Keterbatasan sumber daya dan keahlian di lembaga hukum juga menjadi kendala, sehingga investigasi tidak berjalan optimal. Selain itu, bukti yang kurang jelas dan pengumpulan bukti yang tidak maksimal sering kali menghambat kelancaran proses hukum.

c. Praktik Impunitas

Praktik impunitas, yakni kebijakan yang memungkinkan pelaku pelanggaran HAM untuk terhindar dari hukuman dan memperburuk penegakan keadilan. Dalam banyak kasus, pelaku yang memiliki kekuasaan atau hubungan dengan pemerintah masa lalu tidak diadili dengan tegas. Hal ini memberikan kesan bahwa hukum hanya berlaku bagi sebagian orang, sementara mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan bisa bebas dari pertanggungjawaban hukuman yang seharusnya didapatkan. Praktik impunitas ini memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memperlambat proses rekonsiliasi sosial yang diperlukan untuk membangun kembali negara yang adil dan damai.

d. Ketidakpercayaan terhadap Institusi Hukum

Ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga hukum di Indonesia semakin meningkat akibat masalah di atas. Banyak orang merasa bahwa sistem hukum tidak mampu memberikan keadilan, terutama bagi korban pelanggaran HAM dan keluarga mereka. Ketika pelaku-pelaku yang memiliki kekuasaan tidak diadili, masyarakat kehilangan keyakinan pada keadilan. Hal ini berpotensi merusak partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum dan politik, yang pada akhirnya dapat mengganggu kualitas demokrasi yang ada di Indonesia.

e. Pengaruh Politik dalam Proses Hukum

Pengaruh politik terhadap proses hukum juga menjadi hambatan besar dalam penegakan keadilan. Terkadang proses hukum dipengaruhi oleh tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan



politik, baik dari dalam maupun luar lembaga pemerintahan. Politisi atau kelompok berkuasa sering berusaha untuk menghalangi penyelidikan atau mengubah jalannya proses hukum agar kasus ini tidak melibatkan pihak-pihak yang terhubung dengan mereka. Politisasi masalah pelanggaran HAM memperburuk ketegangan politik dan menghambat tercapainya solusi yang adil dan transparan.

f. Meningkatkan Komitmen terhadap Demokrasi dan HAM

Tantangan ini menunjukkan pentingnya untuk memperkuat komitmen Indonesia terhadap demokrasi dan HAM. Untuk dapat mewujudkan negara yang lebih demokratis dan adil di Indonesia, perlu dilakukan komitmen pada penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara menyeluruh. Ini mencakup tidak hanya menyelesaikan kasus-kasus yang sudah terjadi, akan tetapi juga memastikan bahwa pelanggaran HAM tidak terulang di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan dukungan penuh kepada korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan keadilan. Negara juga harus berupaya menciptakan budaya hukum yang menghormati hak asasi manusia, sehingga setiap individu merasa terlindungi oleh hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil.

Melalui pendidikan demokrasi dan HAM, generasi muda dapat diajarkan pentingnya advokasi untuk penyelesaian pelanggaran HAM. Pemahaman ini dapat memupuk kesadaran bahwa keberanian untuk menuntut keadilan adalah bagian integral dari proses demokratisasi.

KESIMPULAN

Tragedi penculikan aktivis 1998 merupakan peristiwa penting yang menggambarkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan mengungkapkan kegagalan sistem politik yang otoriter. Dari perspektif pendidikan demokrasi, peristiwa ini mengajarkan pentingnya nilai-nilai kebebasan berpendapat, hak untuk mengkritik pemerintah, dan perlindungan terhadap aktivisme politik. Selain itu, tragedi 1998 menggarisbawahi perlunya penguatan sistem hukum dan transparansi dalam pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak demokrasi.

Dalam konteks pendidikan hak asasi manusia, tragedi 1998 mengingatkan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan dari kekerasan, penyijsaan, dan penghilangan paksa. Pendidikan demokrasi dan HAM harus menginternalisasi nilai-nilai ini agar generasi muda memahami pentingnya menjaga hak-hak dasar manusia dan berperan aktif dalam membangun sistem yang adil dan transparan. Dengan memahami tragedi ini, mahasiswa dapat mengembangkan kesadaran kritis terhadap potensi bahaya otoritarianisme, mendorong partisipasi politik yang aktif, dan mengedepankan keadilan

sebagai prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tragedi 1998, dengan segala pelanggarannya, menjadi pelajaran berharga untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

Baity, A. N., & Adi, A. S. (2016). Persepsi aktivis mahasiswa 1998 tentang demonstrasi tahun 1998 dalam rangka menurunkan Soeharto. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 3(4), 1675-1690.

Baity, A. N., & Adi, A. S. (2016). Persepsi aktivis mahasiswa 1998 tentang demonstrasi tahun 1998 dalam rangka menurunkan Soeharto. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 3(4), 1675-1690.

Hamid, at al. (2005). *Menatap Wajah korban*. Solidaritas Musa Bangsa (SMB). Jakarta

Hermawan, C.1 (2004). *Mahasiswa Indonesia*. Bandung: Alfabeta

Sugiono. (2013). *Memahami Penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Stanley. (2005)." Media dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998". Dalam *Menatap wajah korban*.

Solidaritas Musa Bangsa (SMB). Jakarta

Rahayu, LM (2022). Tragedi '98 dalam Sastra Indonesia: Dua Perspektif Kebangsaan. Konferensi Internasional HISKI tentang Literasi Sastra dan Kearifan Lokal ke-31 , 220–231.

Widiawati, & Wiranata, H. I. (2022). Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Membangun Masyarakat Yang Demokratis. *Jurnal Kalacakra*, 3 (1), 41–46.

Zein. A. Dan patra M. (2005). "Mengadili individu yang Bertanggung Jawab atas Tragedi Mei 1998". Dalam *Menatap wajah korban*. Solidaritas Musa Bangsa (SMB). Jakarta.